

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

Nomor SOP : B.279/BPBL-L/HM.410/I/2024

Tanggal Pembuatan : 26 Januari 2024

Tanggal Efektif : 26 Januari 2024

Tanggal Pengesahan : 26 Januari 2024

Tanggal Pengesahan : 26 Januari 2024

Disahkan Oleh : Wawan Cala PPBL Lombok

Wawan Cala PPBL Lombok

Wawan Cala PPBL Lombok

BUDIDA LOMBOR

Wawan Cala PPBL Lombok

Wawan Cala PPBL Lombok

BUDIDA LOMBOR

Wawan Cala PPBL Lombok

Wawan Cala PPBL Lombok

Wawan Cala PPBL Lombok

BUDIDA LOMBOR

Wawan Cala PPBL Lombok

Wawan Cala PPBL Lombok

BUDIDA LOMBOR

Wawan Cala PPBL Lombok

Wawan Cala PPBL Lombok

Wawan Cala PPBL Lombok

Wawan Cala PPBL Lombok

BUDIDA LOMBOR

Wawan Cala PPBL Lombok

Wawan Cala PPBL Lombok

BUDIDA LOMBOR

Wawan Cala PPBL Lombok

Wawan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
Keterbukaan Informasi Publik	b. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang	c. Mempunyai <i>communication skill</i>
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	d. Kemampuan pendokumentasian informasi
Keterbukaan Informasi Publik	
c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	
Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan	
Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan	
dan Perikanan	
d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	
Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar	
Operasional Prosedur	
e. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang	
Standar Layanan Informasi Publik	
f. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi	
Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan	
Perikanan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
- SOP Pemutakhiran Data Informasi Publik	- Komputer/Laptop/Gadget
- SOP Pendokumentasian Informasi Publik	- Jaringan Internet
- SOP Permohonan Informasi	
- SOP Uji Konsekuensi	Danastatan dan Dandataan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan - Buku Tamu
Petugas dilarang menerima segala bentuk apapun yang dapat mengakibatkan KKN	- Daftar Pemohon
monganibanan mm	Bultur i Citionon

		Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan	
No	Uraian Kegiatan	Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi mengajukan keberatan informasi Publik kepada Atasan PPID dengan alasan yang tertera di Permen 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik				Surat keberatan informasi publik Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	Formulir pengajuan keberatan informasi	Pemohon datang langsung
2	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan kepada PPID Pelaksana		•		Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	Formulir pengajuan keberatan informasi Berkas kelengkapan pemohon informasi	
3	Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumuplan informasi/dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID				Daftar informasi publik Surat keberatan informasi Notulensi rapat Nota dinas	30 hari kerja	Informasi/Dokumen	
4	Mengonsep Surat Jawaban/ Tanggapan atas Keberatan Informasi untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan				Disposisi Informasi/ Dokumen	30 menit	Surat jawaban /tanggapan keberatan informasi publik	
5	Pemohon informasi menerima Surat Jawaban/ Tanggapan atas keberatan informasi yang diajuka				Surat Jawaban/ tanggapan keberatan informasi publik diberikan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima	5 menit	Tanda terima dan Arsip	